

**NOTULEN**  
**FGD & PUBLIC HEARING 1**  
**PENYUSUNAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 28 Mei 2025
Lokasi	:	Hotel Horizon inn Alazka Semarang
Peserta	:	Dinas Pariwisata Kab/Kota Se-Jawa Tengah
Narasumber	:	Komisi B DPRD Prov. Jawa Tengah

NO.	NAMA / INSTASI	SARAN / MASUKAN
1.	Pak Ferry – Anggota Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari perencanaan hingga ke pendanaan agar apa yang telah direncanakan dapat tereksekusi.</li> <li>2) Dalam penyusunan Pereda juga perlu memperhatikan dasar hukum di atasnya, dengan adanya perubahan UU Kepariwisata, maka harus ada sinkronisasi agar selaras dengan Undang-Undang</li> <li>3) Perlu mewadahi peran serta masyarakat, agar masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam sektor pariwisata</li> <li>4) Perlu adanya integrasi dengan sektor ekonomi kreatif agar menjadi ekosistem yang saling mendukung</li> <li>5) Pengembangan SDM Pariwisata juga perlu diperhatikan, bukan hanya pelatihan namun SDM yang benar-benar terserap oleh dunia usaha dan memiliki kompetensi</li> </ol>
2.	Ibu Sri Hartini – Ketua Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Kementerian Pariwisata terkait perubahan UU Kepariwisata, agar Perda yang dihasilkan selaras karena diharapkan penyusunan selesai di tahun ini dan dapat di tetapkan</li> <li>2) Pemerintah perlu memperhatikan pengelolaan DTW yang dimiliki oleh Pemda, jangan sampai kalah dengan DTW yang dikelola oleh swasta</li> <li>3) SDM yang bekerja di sektor pariwisata agar memiliki sertifikasi kompetensi, termasuk para pramuwisata</li> <li>4) Pemerintah Provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat, maka harus dapat mengakomodir dan mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Kab/Kota agar selaras dan tidak ada ketimpangan</li> <li>5) Ada beberapa DTW yang pengelolaannya kurang optimal karena kepemilikan atau kewenangan bersinggungan dengan instansi lain misalnya BBWS dan Perhutani, maka perlu dibangun komunikasi yang sinergis agar dapat dioptimalkan</li> <li>6) Jika sudah ditetapkan Perda nantinya Pemerintah Provinsi harus menyusun Pergub yang akan lebih teknis mengatur perihal penyelenggaraan kepariwisataan</li> </ol>
3.	Bu Solekha – Sekretaris Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam Perda maupun Pergub nantinya perlu diuraikan terkait sinergi lintas sektor baik secara vertikal maupun horizontal agar produk hukum yang disusun implementatif dan dapat menjawab isu-isu sektor pariwisata Jawa Tengah</li> </ol>

4.	Pak Amin - Anggota Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disporapar pada tahun ini termasuk OPD yang nantinya akan berubah menjadi Disbudparekraf dan Dispora, namun perubahan ini tentu jangan sampai mempengaruhi penyusunan Raperda</li> <li>2) Perlu adanya perubahan pola pikir bersama terkait pengembangan pariwisata agar lebih maju dan berkembang</li> <li>3) Diharapkan Pemerintah Provinsi menjadi motor penggerak bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk saling bersinergi</li> <li>4) Pemerintah perlu menghadirkan aplikasi yang memudahkan wisatawan untuk memperoleh informasi maupun dalam mempermudah aktivitas pariwisata</li> <li>5) Perlu adanya komitmen Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terhadap sektor pariwisata agar memiliki dampak lebih besar kepada ekonomi masyarakat</li> </ol>
5.	Bu Kadarwati – Anggota Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam pengembangan pariwisata, dapat belajar dengan Pemerintah Provinsi Bali, bagaimana memberdayakan kekayaan alam dan budaya sebagai daya tarik utama kepada wisatawan, tidak hanya mengandalkan wisata buatan yang bersifat musiman</li> <li>2) Perlu konsisten terhadap perencanaan dan realisasi pendaanaan untuk membangun pariwisata Jawa Tengah yang lebih berkembang, bahkan akan lebih baik jika memiliki alokasi khusus yang diwajibkan untuk sektor pariwisata</li> <li>3) Pada masa ini sering terjadi kecelakaan yang melibatkan transportasi pariwisata, kita turut prihatin namun jangan sampai hal ini menjadi dasar untuk melarang kegiatan studi tour, karena siswa berhak untuk mendapatkan edukasi di dalam kelas maupun diluar kelas</li> <li>4) Perhatian khusus terhadap kawasan strategis yang telah ditetapkan nantinya agar menjadi motor penggerak ekonomi daerah disekitarnya</li> <li>5) Perhatian terhadap desa wisata maupun kampung wisata agar apa yang telah terbangun tidak berjalan hanya sementara saja, karena banyak yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata maupun kampung wisata tetapi setelah itu mangkrak dan tidak terawatt</li> <li>6) Pemasaran pariwisata perlu didukung dengan kebijakan yang memadai baik regulai maupun kebijakan anggaran, karena Jawa Tengah orientasinya harus sampai ke mancanegara</li> <li>7) Perlunya perhatian terhadap wisata yang memiliki resiko tinggi agar dilengkapi dengan asuransi kepada wisatawan, pekerja maupun usaha pariwisata itu sendiri</li> </ol>
6.	Bu Endri – Anggota Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecelakaan di daya tarik wisata sering terjadi, maka harus ada pengawasan terkait standar operasional maupun kelayakan sarana-prasarana yang digunakan agar menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan, serta perlu adanya asuransi kepada wisatawan</li> <li>2) Aturan pembatasan yang diterapkan di daya tarik wisata prioritas Candi Borobudur sangat mempengaruhi aktivitas wisata di sekitarnya, sehingga perlu adanya pengkajian ulang terkait pembatasan kuota tersebut</li> </ol>

7.	Pak Zainudin – Anggota Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam menyusun sebuah kebijakan maupun produk hukum perlu memperhatikan 3 aspek yaitu, Filosofis, Yuridis dan Sosiologis</li> <li>2) Perlu adanya penguatan identitas pariwisata Jawa Tengah dan pengembangan inovasi atraksi wisata agar wisatawan tidak bosan dan selalu berkeinginan untuk berwisata ke Jawa Tengah</li> </ol>
8.	Pak Endro – Wakil Ketua Komisi B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah perlu memperhatikan usaha pariwisata yang berkembang khususnya di Jawa Tengah, agar tetap menjaga SOP dan dampak sosial lingkungan, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat sekitar</li> </ol>
9.	Bu Windarsih – Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kab. Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kab. Semarang kaya akan daya tarik wisata alam, salah satunya adalah Danau Rawa Pening yang berstatus sebagai Danau Prioritas Nasional serta menjadi kawasan strategis yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, harapannya Rawa Pening nantinya dapat dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata</li> </ol>
10.	Pak Totok – Disporapar Kab. Kendal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam pengelolaan Desa Wisata terkadang terjadi konflik yang terjadi antara Pokdarwis dengan BUMDes yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan Desa Wisata, kemudian berkaitan dengan pencanangan Koperasi Merah Putih yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat perlu adanya kejelasan terkait lembaga yang nantinya mengelola Desa Wisata agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan Desa Wisata mati karena yang akan dirugikan adalah masyarakat</li> </ol>

**NOTULEN  
FGD & PUBLIC HEARING 2  
PENYUSUNAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 18 Juni 2025
Lokasi	:	Hotel Horizon Inn Alazka Semarang
Peserta	:	- Akademisi Perwakilan Perguruan Tinggi Berkontribusi Di Sektor Pariwisata Jawa Tengah
Narasumber	:	- Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar Jawa Tengah

NO.	NAMA / INSTASI	SARAN / MASUKAN
1.	Pak Heri – Poltekpar NHI Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisata secara filosofis mengacu pada 4 Pilar Pembangunan Kepariwisata yaitu : Destinasi, Industri, Kelembagaan, dan Pemasaran. Sehingga substansi yang ada dalam Raperda harus memuat 4 pilar tersebut.</li> <li>2) Raperda juga harus mampu menjawab isu-isu strategis yang terjadi pada sektor pariwisata yang dinamis.</li> <li>3) Desa wisata di Jawa Tengah hampir separuh berkembang kurang maksimal, fenomena desa wisata musiman menjadi tantangan dalam pengembangan destinasi di Jawa Tengah, pemerintah harus memiliki formulasi yang jelas terkait pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.</li> </ol>
2.	Bu Gana – STIEPARI Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pada Tahun 2023 dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum terkait sektor pariwisata di Jawa Tengah, 3 produk hukum berupa Perda yang saat ini masih berlaku dilakukan pencermatan oleh Kemenkumham, hasil dari anev tersebut adalah perlunya harmonisasi dan simplifikasi terhadap 2 Perda yaitu Perda tentang Pramuwisata dan Perda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.</li> <li>2) Perda kedepanya disusun secara simpel, secara umum namun menyeluruh, dapat mengakomodir kebutuhan sektor pariwisata. Namun secara teknis rinci harus dijabarkan di Peraturan Gubernur</li> <li>3) Peraturan diharapkan juga dapat mengakomodir kemungkinan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap usaha pariwisata, sehingga dapat menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di Jawa Tengah</li> </ol>
3.	Pak Pranoto – STIEPARI Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Di dalam Raperda telah tertuang BAB mengenai Usaha Pariwisata, namun lebih baik menggunakan frasa industri pariwisata, karena cakupannya lebih luas</li> <li>2) Berkaitan dengan BAB Kawasan pariwisata maka perlu dikaji kembali terkait kawasan yang berstatus strategis nasional sesuai dengan RIPPARNAS</li> <li>3) Terkait BAB Pramuwisata dan BAB Desa Wisata masuk kedalam 13 Usaha Pariwisata sehingga tidak perlu dibuatkan BAB secara khusus</li> <li>4) Usulan BAB MICE juga masuk dalam BAB Industri Pariwisata</li> <li>5) Harus memuat terkait monitoring dan evaluasi implementasi Perda</li> </ol>

4.	STP Sahid Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jogja masih menjadi tujuan wisata primadona, saat ini Surakarta hanya seperti pelengkap bagi wisatawan jika berkunjung ke jogja, sehingga memerlukan inovasi agar menaikkan daya saing</li> <li>2) Jawa Tengah memiliki wisata alam yang sangat banyak dan beragam namun masih minim promosi</li> <li>3) Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengembangkan sektor pariwisata</li> <li>4) Kondisi aksesibilitas menuju daya tarik wisata masih banyak yang kurang memadai, hal ini cukup berpengaruh pada minat wisatawan untuk berkunjung</li> </ol>
5.	Bu Cindy – UDINUS Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kehadiran Investor dapat menjadi modal kebangkitan pariwisata di Jawa Tengah, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang dilakukan agar investor tertarik untuk membuka usaha pariwisata di Jawa Tengah</li> <li>2) Banyak sekali kuliner khas yang dimiliki oleh Jawa Tengah, hal ini dapat menjadi solusi yang unik sebagai strategi pemasaran dikarenakan untuk memiliki daya saing di sektor teknologi dan inovasi diperlukan modal yang cukup besar, maka dengan kuliner tradisional dapat menjadi daya tarik yang dapat dikembangkan di masing-masing daerah sesuai kekhasannya masing-masing.</li> </ol>

**NOTULEN  
FGD & PUBLIC HEARING 3  
PENYUSUNAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 9 Juli 2025
Lokasi	:	Hotel Grasia Semarang
Peserta	:	- Asosiasi / Lembaga Pariwisata
Narasumber	:	- Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar Jawa Tengah Komisi B DPRD Prov. Jawa Tengah

NO.	NAMA / INSTANSI	SARAN / MASUKAN
1.	Pak Aris Vertikal (FK Desa Wisata)	Pariwisata di Jawa Tengah tetap bergeliat di era efisiensi, dapat dilihat di beberapa Daya Tarik Wisata tetap ramai oleh wisatawan, walaupun saat ini spending bagi segmentasi menengah kebawah menurun. Hal ini menjadi bukti bahwa wisata / rekreasi adalah kebutuhan bagi setiap orang walaupun dengan dana yang minim. Potensi wisata di Jawa Tengah sangat komplit dan didukung dengan komunikasi antar lembaga / stakeholder yang erat. Harapannya Pemerintah sering melibatkan lembaga / asosiasi agar jalinan komunikasi dan sinergitas terus terbangun.
2.	Pak Farchan Anggota Komisi B DPRD Prov. Jateng	Pengembangan infrastruktur sangat mempengaruhi geliat pariwisata di daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Bawen – Jogja yang nantinya juga ada exit tol di Borobudur, hal ini tentu saja akan mempermudah wisatawan untuk menuju ke Borobudur. Konektifitas yang menghubungkan Solo – Selo – Borobudur (SSB) perlu ditingkatkan agar menarik lebih banyak wisatawan. Terkait penyusunan Perda Penyelenggaraan Kepariwisata ini tentu saja memerlukan keterlibatan Pemerintah Kab / Kota supaya ada sinkronisasi kebijakan karena daya tarik wisata berada di Kab / Kota. Geliat pariwisata juga dapat memantik perekonomian lokal.
3.	Pak Harun Anggota Komisi B DPRD Prov. Jateng	Dalam Daftar Identifikasi Masalah (DIM) dalam penyusunan revisi UU Kepariwisata di DPR RI, dikemukakan klausul bahwa Pariwisata menjadi bagian dari urusan wajib. Terdapat perubahan klausul pelaku usaha pariwisata berubah menjadi pengusaha pariwisata, sehingga nantinya mohon untuk disesuaikan. Pembentukan ekosistem pariwisata perlu dipersiapkan, konektifitas antar pengusaha pariwisata diperlukan agar membentuk suatu travel pattern yang saling melengkapi satu sama lain. Digitalisasi pada sektor pariwisata pada era ini juga diperlukan agar relevan dengan perkembangan zaman, dan diharapkan dapat mempermudah wisatawan dalam aktifitas berwisata. Digitalisasi juga diperlukan dalam hal pencatatan pendapatan dari aktifitas pariwisata, supaya PAD lebih

		akuntabel. Media sosial juga berperan penting dalam hal menginformasikan hal-hal penting yang perlu diinformasikan kepada wisatawan. Optimalisasi Sumber Daya Alam tidak hanya di eksploitasi tetapi juga dikemas menjadi aktifitas konservasi alam. Penyelenggaraan sport tourism juga mampu mengangkat jumlah kunjungan wisatawan, seperti yang telah dilaksanakan di Karimunjawa yaitu Sky Diving Internasional yang diikuti oleh beberapa pegiat olahraga dari mancanegara, diharapkan agar event ini menjadi magnet wisatawan mancanegara.
4.	Pak David Ishaq Anggota Komisi B DPRD Prov. Jateng	Penyusunan Raperda ini menjadi upaya dalam membangun pariwisata Jawa Tengah semakin maju. Terutama terkait program Gubernur yaitu membangun 1.000 Desa Wisata memerlukan strategi yang tepat dan efisien untuk mewujudkan program tersebut. Jangan sampai Desa Wisata yang dirintis kemudian mati dan terbengkalai. Penyelenggara pariwisata bisa berkolaborasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif agar Desa Wisata semakin hidup.
5.	Pak Sugeng Wakil Ketua GIPI Jateng	Daya saing Jawa Tengah dengan daerah lain masih stagnan, hal ini tercermin juga dalam hal alokasi anggaran di sektor pariwisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tak bisa jauh dari penyediaan 4 A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Amenity). Keadaan pariwisata saat ini sempat terguncang dengan kebijakan efisiensi, di sektor perhotelan sangat terasa sekali bahwa kebijakan ini dirasakan seperti masa COVID-19 bahkan lebih parah. Semoga kebijakan semakin melonggar dan menghidupkan geliat aktifitas di sektor perhotelan. Kolaborasi dengan 35 Kab/Kota dengan menyusun Calendar of Events sangat diperlukan, agar event ini menjadi bagian dari promosi wisata daerah. Pemerintah Kab / Kota dapat mengusulkan kurang lebih 2 s.d 3 DTW unggulan yang perlu di dorong agar menjadi program bersama dengan rekan-rekan asosiasi untuk memajukan pariwisata di daerah. Promosi luar negeri digalakkan kembali supaya dapat mengakomodir pengusaha pariwisata agar dapat hadir di pameran internasional. Pemerintah perlu membangun keterampilan SDM di sektor pariwisata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Jawa Tengah.
6.	Bu Anita ASITA Jateng	Travel Biro menyusun paket wisata sesuai dengan segmentasi pasar, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Semenjak COVID-19 pola nya sangat berbeda. Kita dalam menjual paket wisata tidak mau mengambil resiko, kita hanya menjual paket wisata yang benar-benar siap dalam menerima tamu terutama mancanegara. Sarana prasarana sangat menjadi hambatan bagi kami dalam menyusun paket wisata, ada beberapa destinasi yang bagus tapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang kurang memadai.

		Petunjuk arah sangat-sangat kurang dan tidak informatif bagi wisatawan. Saat ini kami sering melayani tamu cruise ship, sarana prasarana di pelabuhan tanjung emas sangat tidak layak, bahkan dalam program renovasi terminal, kami di haruskan menggunakan pelabuhan peti kemas yang kondisinya benar-benar tidak layak bagi tamu mancanegara.
7.	Pak Ari BPPD Jateng	Kami mohon agar draft raperda untuk di sampaikan ke asosiasi agar kami dapat mencermati secara detail terkait apa saja yang dimuat dalam Raperda penyelenggaraan kepariwisataan
8.	Bu Gana BPPD Jateng	Pemerintah perlu mendorong kawasan pariwisata unggulan yang menjadi andalan dan siap untuk dijual dan sebagai citra pariwisata Jawa Tengah. Penerapan model Branding, Advertising dan Selling perlu ditingkatkan kembali di Jawa Tengah, jangan sampai kalah dengan daerah sebelah. Perlu penyelenggaraan expo-expo yang berorientasi kepada seller dan buyer, jika perlu diadakan diskon terhadap paket-paket wisata, harga tiket, akomodasi dan diskon lainnya supaya orang tertarik untuk berwisata ke Jawa Tengah.
9.	Bu Titah PUTRI Jateng dan ASPERAPI Jateng	Jawa Tengah itu sebenarnya berpotensi sebagai daerah penyelenggaraan MICE. Exhibitions perlu di dorong lagi kaitan dengan penyediaan venue yang bertaraf nasional maupun internasional, untuk memenuhi kriteria sebagai tuan rumah suatu Event MICE. Kami berharap MICE dapat diakomodir dalam Raperda penyelenggaraan kepariwisataan. Terkait pengelolaan Daya Tarik Wisata harapkan para pengelola DTW dapat meningkatkan sertifikasi K3 bagi karyawan di DTW, agar kualitas keamanan dan keselamatan wisatawan di DTW.
10.	Pak Bimo PUTRI Jateng	Perlu dimasukkan di dalam Raperda terkait tata kelola daya tarik wisata, dikarenakan keberlangsungan sebuah destinasi pariwisata perlu didukung dengan tata kelola yang baik serta didukung pula dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan standar kompetensi yang memadai, kemudian terkait manajemen keuangan yang diterapkan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik, jangan sampai daya tarik wisata dikelola tidak akuntabel, sehingga merugikan daya tarik wisata itu sendiri.
11.	Pak Aziz PHRI Jateng	Semenjak ada kebijakan efisiensi sektor perhotelan sangat terpengaruh, bahkan melebihi keadaan pada saat COVID-19. Banyak sekali rekan-rekan pegawai hotel yang mengalami PHK atau dirumahkan sementara karena memang geliat di hotel sedang lesu. Terkadang untuk mensiasati itu pengelola hotel sampai harus menerapkan kebijakan parkir berbayar bagi tamu-tamunya. Pada moment wisata lebaran waktu yang lalu, banyak wisatawan memadati daya tarik wisata namun sektor perhotelan sepi, ini menjadi fenomena yang saat ini terjadi. Kami pengelola hotel perlu memutar otak

		supaya kebijakan pemerintah ini tidak mempengaruhi keberlangsungan usaha perhotelan.
12.	Bu Ocha HPI Jateng	Kami beberapa kali menyerukan terkait usaha agar wisatawan dari luar daerah agar menggunakan jasa guide lokal yang sudah berlisensi. Permasalahan saat ini banyak sekali guide amatir yang tidak bersertifikasi, dipergunakan jasanya oleh biro perjalanan wisata yang ingin menekan cost, tetapi hal tersebut tentu saja sangat merugikan bagi rekan-rekan guide yang telah memiliki lisensi, harapannya pemerintah dapat mengatur hal tersebut agar kualitas pelayanan pariwisata Jawa Tengah tidak semakin menurun dikarenakan maraknya guide amatir.